

HAK ASASI MANUSIA *VIS A VIS* PEMBANGUNAN: BERTEMUNYA KEPENTINGAN INDIA, CINA DAN MYANMAR

Oleh: Sugiaro Pramono
Peneliti pada Centre for Asian Society Studies (CASS),
Email: sugiartop@gmail.com

Abstract

Human rights emerged as a global issue at least the post-cold war. Almost all countries in the world recognized human rights principles. Various attempts were made by countries and various International Non-Governmental Organizations who are committed to upholding the values of human rights. Through multilateral negotiations involving the mass media; interest groups and pressor groups; the academics and civil society to to promote and declare the values of human rights. But, political realism of states in the pursuit of national interests often ignore the values of human right. The economic growth of India and China are very progressive and make these countries need access to markets, raw materials and energy. those Insistence encourage the two government closer to the military junta in Myanmar. Though junta in Myanmar to be an actor severe human rights violations. This article came to the conclusion, the government's commitment to the enforcement of human rights shifted when in conflict with economic interests. Two records that appear are: first, the rate of the Indian economy and China has implications for both countries increasingly indifferent to the affairs of human rights in Myanmar; second, there is a symbiotic mutualism relationship between the two countries with Myanmar that could potentially hinder the enforcement of human rights, especially in Myanmar.

Keywords: *Realism, development, human rights.*

A. PENDAHULUAN

Cerita ini dimulai sejak India dan Cina menyadari dirinya menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang fantastis dan melihat Myanmar yang sebelumnya bukan apa-apa menjadi sangat penting karena kandungan gas alamnya. Saat itu kedua negara pemain baru ekonomi dunia, India dan Cina yang juga tetangga perbatasan, mulai melirik dan secara pelan namun pasti mendekati negeri Junta tersebut. Indikator paling mudah ditunjuk selain meningkatnya angka perdagangan kedua negara dengan Myanmar, saling kunjung

pejabat dan aneka bantuan infrastruktur ke Myanmar adalah keberadaan perusahaan gas dan minyak Cina seperti China National Offshore Oil Corporation dan China National Petrochemical Corporation dan perusahaan gas dan minyak asal India seperti ONGC Videsh Ltd., GAIL dan Essar Oil Ltd¹.

Ada dua poin penting yang perlu digaris bawahi: *pertama*, terjadi

¹"Oil and Gas in Myanmar" diakses dari http://birmanie.total.com/en/contexte/p_1_2.htm, Kamis 23 des 2010: 11:43

rivalitas antara India dan Cina dalam memperebutkan sumber gas dan minyak di Myanmar; dan *kedua*, celakanya peristiwa mendekatnya India dan Cina ke Myanmar bersamaan dengan lilitan berbagai pelanggaran HAM oleh Junta hingga pada tahap mengundang tekanan bertubi-tubi dari masyarakat internasional terhadap rezim berkuasa di Myanmar, bahkan karena alasan itu pula Amerika, negara-negara Eropa dan PBB mengembargo Myanmar.

Tulisan ini berfokus pada menjawab dua pertanyaan: (1) mengapa India dan Cina mendekati Myanmar? Dan (2) apa aneka kemungkinan implikasi merapatnya India dan Cina ke Myanmar terhadap penegakan nilai-nilai HAM di Myanmar?

1. Realisme politik versus HAM

Ada, menurut penulis, dua konsep yang dapat dipakai untuk menjelaskan perilaku India, Cina dan Myanmar serta perdebatan HAM yang mengitarinya, yaitu: realisme politik dan HAM. Realisme politik merupakan perspektif paling tua dalam studi Hubungan Internasional. Kendati terdapat aneka kritik ditujukan terhadapnya namun tidak sedikit fakta empirik hubungan internasional kontemporer yang justru semakin melegitimasi keyakinan para pendukung perspektif ini.

Secara ringkas realisme politik dalam studi HI dapat dijelaskan dalam tiga argumentasi. *Pertama*, realitas internasional sejatinya merupakan

arena pertarungan negara-negara dengan aneka kepentingan yang melatar belakangnya; *dua*, terdapat beragam cara yang digunakan negara dalam memperjuangkan kepentingannya di tingkat internasional diantaranya adalah menggunakan instrumen militer, ekonomi dan diplomasi; dan *ketiga*, keyakinan bahwa idealitas hubungan internasional adalah omong kosong. Berbagai isu moral seperti HAM, lingkungan, demokrasi serta aneka isu lainnya yang berbasis moralitas tidak lebih dari siasat negara untuk menaklukkan negara lain.

Secara lebih riid, Keggle dan Witkopf sebagaimana di kutip oleh Aleksius Jemadu, menguraikan sedikitnya 10 asumsi dasar perspektif ini. (1) manusia pada dasarnya mementingkan diri sendiri tanpa mepedulikan etika dan selalu terdorong untuk mengambil keuntungan dalam berhubungan dengan orang lain; (2) hasrat manusia untuk berkuasa dan mendominasi orang lain merupakan niat buruk yang paling menonjol dan berbahaya dalam hubungan dengan sesamanya; (3) peluang untuk menghilangkan hasrat untuk meraih kekuasaan hanyalah sebuah aspirasi yang utopis; (4) esensi dari politik internasional adalah pertarungan untuk meraih kekuasaan di mana prinsip "*war of all against all*" berlaku; (5) kewajiban utama negara yang melampaui semua tujuan nasional lainnya adalah memperjuangkan kepentingan nasional dan meraih kekuasaan untuk mewujudkannya; (6) sistem internasional yang anarkis memaksa

negara untuk meningkatkan kapabilitas militernya guna menangkal serangan dari musuh potensial dan menjalankan pengaruhnya atas negara lain; (7) kekuatan militer lebih penting daripada ekonomi demi tercapainya keamanan nasional dan pertumbuhan ekonomi hanyalah sarana untuk mencapai dan memperluas kekuasaan dan prestise negara; (8) sekutu dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan negara dalam mempertahankan diri tetapi kesetiaan dan keandalannya tidak bisa dipastikan sebelumnya; (9) negara tidak boleh mengandalkan organisasi internasional atau hukum intrenasional untuk menjamin keamanan nasionalnya. Selain itu negar ajuga harus menolak setiap upaya pengaturan prilaku internasional melalui mekanisme pemerintahan global; dan (10) karena semua negara berusaha untuk meningkatkan kekuatannya maka stabilitas hanya bisa dicapai melalui keseimbangan kekuatan (*balance of power*) yang diperlancar oleh pembentukan dan pembubaran aliansi-aliansi yang saling bertentangan².

Atau dengan kata lain Keggley dan Witkopf hendak mengatakan bahwa sejatinya prilaku negara—negara di kancah internasional tidak ubahnya dengan prilaku orang-orang primitif dan barbar yang mengabaikan samasekali etika dan menyembah kepentingan diri sendiri. Dengan serangkaian asumsi ini prilaku prilaku India, Cina dan Myanmar dijelaskan.

Di sisi lain, bersamaan dengan berakhirnya perang dingin isu HAM menjadi agenda penting masyarakat global. Konsep keamanan di zaman baru memiliki definisi yang jauh lebih kompleks dan rumit ketimbang konsep keamanan di era perang dingin. Bila dulu keamanan hanya dimaknai sebagai keamanan negara (*national security*) kini keamanan juga berarti kemanan manusia (*human security*). Munculnya konsep baru ini tentu bukan tanpa implikasi, serangkaian kontradiksi pun muncul dan menjadi perdebatan sengit. Dalam konteks perdebatan ini HAM menjadi salah satu unsur penting yang tak pernah habis diperdebatkan bahkan untuk waktu yang sangat lama di masa depan.

Bangsa-bangsa barat memahami HAM sebagai serangkain nilai dasar setiap manusia yang berlaku secara universal dengan tidak menghiraukan keragaman suku, agama, ras maupun bangsa, sejalan dengan argumen ini Donnely seperti dikutip oleh Aleksius Jemadu, membahasakan "*human right are the right one has simply by virtue of being a human being*"³. Sehingga, karena ia bersifat universal maka berbagai intervensi terhadap negara lain untuk menegakan HAM dapat dibenarkan. Sementara di sisi yang berbeda negara-negara non barat memaknai HAM sebagai berbasis nilai-nilai lokal. Negara-negara Asia misalnya menawarkan sejumlah konsep seperti *cultural relativism*, *communitarianism* dan *developmentalism*. Lebih jauh

² Jemadu, A. (2008). *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal: 21-22.

³ *Ibid*, hal: 285.

bahkan Negara-negara non barat memaknai definisi barat terhadap HAM yang diyakini universal kerap kali justru menjadi instrument politik untuk menaklukkan bangsa lain. Invasi Amerika ke Irak (2003) yang berdalih demokratisasi dan HAM, serta ke Afganistan (2001) yang diklaim sebagai perang melawan terorisme misalnya dapat ditunjuk sebagai contoh yang gamblang. Perebutan berbelit yang sarat kepentingan terkait konsep HAM inilah yang kerap berkontribusi terhadap buruknya implementasi HAM.

2. HAM di Myanmar

Rezim otoriter selalu identik dengan pelanggaran HAM, contoh paling dekat yang dapat ditunjuk adalah Orde Baru (Orba). Kekejaman rezim otoriter Orba misalnya dapat dilihat dari serangkaian pembantaian ribuan orang yang diduga terlibat PKI di paruh ke dua dekade 60 an, penembakan misterius (petrus) terhadap preman-preman yang dianggap berbahaya, aneka pelanggaran HAM di Aceh, Papua, Maluku hingga Timor Timur (sekarang Timor Leste) serta masih banyak lainnya.

Di Myanmar tidak kalah mengerikannya, Junta memiliki prestasi yang sangat buruk dalam penghormatan terhadap HAM. Momen teranyar adalah yang terkenal dengan peristiwa *cyclone nargis* (2008). Kebengisan Junta dalam tragedi tersebut, sebagaimana dikutip Annisa Gita Srikandi dari UNDP: Community Driven Recovery, memakan korban

jiwa hingga 138. 000 orang⁴, setelah sebelumnya angka keramat 8-8-88 yang menunjukkan peristiwa berdarah lain yang dilakukan rezim militer tersebut pada tanggal 8 Agustus 1988 pada waktu gerakan pro demokrasi di Myanmar melakukan aksi demonstrasi besar-besaran menggugat otoriterian Junta.

Secercah harapan sejatinya muncul ketika pada 7 November 2010 pemerintah menyelenggarakan pemilu, namun masyarakat global nampak sangat skeptis terhadap pesta demokrasi di Myanmar. Hal ini wajar, karena di saat yang bersamaan Junta tidak kunjung melepaskan tahanan rumah, Suu Kyi.

Kendati pada akhirnya beliau dibebaskan, kendati sayangnya pembebasan tersebut dilakukan di waktu menjelang pemilu. Tidak hanya itu partai pimpinan Suu Kyi, *National League for Democracy* (NLD) pun dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) partai-partai yang dilarang ikut pemilu. Dengan serangkaian langkah tersebut, Junta sejatinya hendak mengunci mati gerakan pro demokrasi di Myanmar.

Buruknya penyelenggaraan pemilu memunculkan reaksi dari masyarakat global. Sikap pesimis terhadap perkembangan demokrasi di Myanmar nampak dari aneka respon yang ditujukan terhadap hasil pemilu. Presiden ASEAN *Inter-Parliamentary Myanmar Caucus* (AIPMC) Eva

⁴ Srikandi, AG. (2010) *Humanitarian Action and Responsibility to Protect in Myanmar: The Political Willingness of the Myanmar Government after Cyclone Nargis*. (makalah dalam seminar IIS-FISIPOL-UGM, Mei 2011).

Kusuma Sundari misalnya mengomentari dengan nada kecewa: "Hasil pemilu Myanmar harus ditolak. Alasannya, pemilu yang digelar Junta itu tidak memiliki unsur sebagai pemilu yang bebas dan bersih"⁵. Kutukan juga muncul dari Komite HAM PBB, dengan mengatakan bahwa hasil pemilu tersebut adalah kecurangan (International okezone, 21/12/2010).

B. MEMAHAMI PRILAKU INDIA DAN CINA

Uniknya, berbeda dengan mayoritas masyarakat internasional yang mengutuk pemerintahan militer Myanmar, karena aneka kebijakkannya yang represif, sarat dengan pelanggaran HAM dan sangat otoriter, India dan Cina justru memilih langkah yang sangat tidak populer. Berbagai kontrak kerjasama telah dilakukan kedua negara dengan Myanmar. Aneka kesepakatan, bantuan ekonomi, saling kunjung-mengunjungi antar pejabat negara telah dilakukan. Bahkan Jenderal dengan cacat HAM, Than Shwe, yang memimpin penumpasan aksi rohaniwan Buddhis pro demokrasi dengan kekerasan pada tahun 2007, telah mengunjungi museum Pahlawan Kemerdekaan India dan Pejuang Anti kekerasan Mahatma Gandhi (Internasional okezone, 21/12/2010).

⁵ "Indonesia Diminta Tolak Hasil Pemilu Myanmar" *Tempo Interaktif*, Senin 15 November 2010-14:41 wib., diakses dari: <http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2010/11/15/brk,20101115-291979.id.html>, Selasa 21 des 2010, pukul 10:30 WIB.

Dalam kunjungan yang berlangsung 25 hingga 29 Juli 2010 itu, Than Shwe menandatangani sejumlah kesepakatan diantaranya (1) pencegahan penyelundupan senjata dari India ke Myanmar.; (2) Bank EXIM India menyediakan kredit 60 juta dollar AS (sekitar Rp 540 miliar) kepada Myanmar untuk membiayai proyek pembangunan rel kereta api; dan (3) India turut mendorong kerja sama sektor migas dengan rencana mengimpor gas, untuk itu disiapkan dana 1 miliar dollar AS demi mengembangkan sektor migas di Myanmar⁶.

Padahal jika menengok sejarah hubungan kedua negara, terutama ketika demonstrasi para aktivis pro demokrasi 1988, India begitu garang terhadap Myanmar. Hal ini nampak misalnya dari sikap PMS Malik, Duta Besar India, yang begitu kuat melawan rezim represif Junta, bahkan kantor perwakilan India di Myanmar kala itu menjadi rumah sakit sementara bagi para demonstran yang terluka⁷. Sikap serupa juga ditunjukkan Cina, tidak hanya nilai perdagangan Cina-Myanmar yang meningkat, seperti kasus perdagangan India Myanmar. Cina juga menanamkan banyak investasi di

⁶ "PBB Kutuk Hasil Pemilu Myanmar" Jum'at, 19 November 2010 - 11:08 wib diakses dari: <http://international.okezone.com/read/2010/11/19/18/394786/pbb-kutuk-hasil-pemilu-myanmar>, Selasa 21 Des 2010, pukul 10:30 WIB.

⁷ Renaud, Egreteaud. (2003). "India and Burma/ Myanmar Relations From Idealism to Realism". (paper draft). Conference on *India and Burma/ Myanmar Relations: From Idealism to Realism*. Thursday 11th September 2003, Conference Room I, India International Center, New Delhi, India. Hal: 3.

negeri Junta dan beragam bantuan infrastruktur.

1. Bertemuinya kepentingan India, Cina dan Myanmar

Ekonom Goldman Sachs (bank investasi terbesar AS) pada tahun 2001 meramalkan India—disamping Brasil, Rusia dan Cina yang kemudian dikenal dengan singkatan BRIC—akan menjadi empat ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050⁸. Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat India dan Cina memiliki serangkaian konsekuensi kebutuhan yang dapat ditemukan di Myanmar. Beberapa diantaranya yaitu:

Pertama, kedua negara memiliki kebutuhan yang sangat besar terhadap sumber energi untuk menggerakkan industrialisasi di dalam negeri. Kandungan gas dan minyak bumi di Myanmar menjadi sangat penting di mata negara-negara yang secara ekonomi sedang melaju sangat kencang. Hubungan baik mereka terhadap Myanmar akan membuka akses ke dalam sumber energi yang dimiliki negeri Junta. Terlebih lagi secara geografis kedua negara berbatasan secara langsung dengan Myanmar yang artinya biaya yang harus ditanggung ketika mereka mengakses energi alam dari Myanmar akan jauh lebih kecil ketimbang biaya yang harus mereka bayar ketika mengimport energi dari misalnya Timur Tengah.

Kedua, bagi India, negara junta ini menjadi semacam jembatan darat (*land bridge*)⁹ untuk aneka produk India yang akan menyerbu konsumennya di Asia Tenggara. Satu hal yang perlu digaris bawahi adalah Asia Tenggara memiliki penduduk hingga setidaknya setengah milyar, bahkan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia berada di kawasan ini. Makna jumlah penduduk yang banyak bagi negara-negara industri maju seperti India dan Cina adalah dua, konsumen dan buruh murah.

Dalam konteks ini maka Myanmar menjadi sangat penting di mata India. Memiliki hubungan baik dengan Myanmar bagi India berarti memotong ongkos transportasi produk-produk India yang akan diekspor ke Asia Tenggara. Karena selain beresiko tinggi, perjalanan laut memiliki ongkos yang lebih mahal ketimbang jalur darat. Selain itu Asia Tenggara di mata India juga merupakan pasar regional yang senyap dari persaingan bila dibandingkan Eropa dan Amerika. Satu-satunya pesaing handal India di kawasan ini hanyalah Cina.

Bila Myanmar menjadi satu-satunya jembatan produk-produk India menuju Asia Tenggara, maka tidak demikian dengan Cina. Cina kendati memiliki *interest* yang sangat besar terhadap pasar di kawasan sebelah selatannya namun ketergantungan Cina terhadap Myanmar sebagai jalur darat tidak

⁸ "RI berpeluang masuk kelompok raksasa baru" harian *Media Indonesia*. Rabu, 3 November 2010. Hal: 17.

⁹ Mohan, C. Raja. (2010). "Embrancing Myanmar: India's Foreign Policy Realism", dalam *RSIS COMMENTARIES*. Hal: 2.

sekuat India, karena akses Cina ke Asia Tenggara selain dihindangi oleh Myanmar juga oleh Vietnam dan Laos.

Ketiga, Bagi Myanmar, dalam situasi terpinggirkan oleh aneka kritik tajam masyarakat internasional yang dialamatkan kepadanya karena berbagai pelanggaran HAM yang telah dilakukan, Junta masih memiliki peluang untuk tetap eksis. Buruknya perlindungan terhadap hak asasi manusia mencitrakan Junta sebagai negeri yang tidak atau setidaknya kurang menarik bagi para investor, namun tidak bagi para investor dari India dan Cina, mereka mampu melihat aneka peluang yang ditawarkan Junta ketika justru para investor lain enggan datang ke Myanmar, karena alasan kemanusiaan.

India bahkan berkomitmen membangun infrastruktur Myanmar, ini maknanya Myanmar dalam jangka waktu panjang akan menjadi tempat penting yang menjadi bagian dari sirkulasi ekonomi para pebisnis India. Di sisi lain Junta juga pandai dalam memainkan kartu gas alam dan minyak bumi. Mengetahui dua tetangga dekatnya menjadi kekuatan kunci ekonomi global maka peluang untuk melakukan politik "dagang sapi" sebagai strategi keluar dari marginalisasi masyarakat global pun dilakukannya. Myanmar menjadi sangat berarti bagi India dan Cina, sehingga selesailah sudah cerita embargo trio Amerika, Eropa dan PBB.

2. Aneka kemungkinan implikasi terhadap HAM

HAM menjadi isu senter terutama paska perang dingin, bahkan pada perkembangannya sangat menentukan citra suatu negara di mata negara lain, setidaknya hal tersebut diharapkan oleh para pejuang HAM. Negara dengan pelanggaran HAM tinggi akan sulit dalam diplomasi global. Kerjasama militer Indonesia-Amerika menjadi contoh yang apik terkait dengan hal ini. Setelah tragedi pembantaian di pemakaman Santa Cruz, Dili, Timor Timur, 12 November 1991 yang mengakibatkan sedikitnya 200 orang tewas, hubungan kedua negara yang sebelumnya harmonis menjadi "porakporanda"¹⁰. Pelanggaran HAM yang dilakukan Komandan Pasukan Khusus (Kopasus) di Timor Timur (sekarang Timor Leste), dalam perkembangannya, selalu menjadi batu sandungan bagi hubungan kedua negara. Hal ini jugalah yang sudah sewajarnya terjadi dengan Myanmar, namun kepentingan India dan Cina nampaknya semakin mengkaburkan konstruksi wacana penghormatan terhadap HAM sebagai basis hubungan antar negara.

Hemat penulis, terdapat serangkaian implikasi dari kedekatan India dan Cina terhadap Myanmar yang mengancam penegakan nilai-nilai HAM, *pertama*, di tengah hujatan dari masyarakat internasional untuk memarginalkan Junta dari hubungan internasional karena buruknya

¹⁰ Silaen, Victor. 2009. "Pasang Surut Hubungan dan Kerja Sama Militer AS-RI" *Verity Jurnal Hubungan Internasional*, Tahun 1, Nomor 2, Juli-Desember. Tangerang: Jurusan Hubungan Internasional. UPH. Hal: 2.

penghormatan rezim militer itu terhadap HAM, mendekatnya kedua negara besar itu membuat Junta mendapat angin segar. Aneka bantuan yang berasal dari India dan Cina tidak hanya menguatkan basis ekonomi Junta namun juga mereduksi habis-habisan rasa tekanan terhadap Junta, sehingga bukan tidak mungkin justru berbanding terbalik semakin menguatkan kembali semangat otoritarianisme Junta yang maknanya memperbesar munculnya berbagai bentuk pelanggaran HAM.

Kedua, di tingkat global realisme politik India dan Cina semakin memperpanjang jalan terjal berliku masyarakat global dalam mengupayakan perdamaian dan demokratisasi di Myanmar. Kemungkinan buruk lainnya adalah efek domino dari kepongahan Junta. Rezim-rezim otoriter di Asia Tenggara bukan tidak mungkin mengikuti langkah Junta, dengan memanfaatkan interdependensi ekonomi sebagai basis upaya dalam men *counter* embargo.

Ketiga, terbangunnya pesimisme masyarakat global terhadap penegakan HAM, serta menguatnya asumsi bahwa para mafia dan bandit yang memiliki akses besar terhadap ekonomi memiliki wewenang untuk melakukan pelanggaran HAM dengan tanpa konsekuensi apapun, seperti yang dilakukan Junta. Junta dengan akses ekonomi dari dua kekuatan *super power* baru seakan memiliki kebebasan terhadap berbagai tindakan sekalipun tidak bermoral.

Keempat, membuka kemungkinan yang lebih lebar bagi munculnya aksi kekerasan, baik yang

muncul dari Junta maupun sebagai respon terhadap sikap Junta. Aksi kekerasan jenis ke dua ini kerap kali dimaknai oleh rezim penguasa sebagai terorisme dan aksi makar. Dalam konteks ini maka kekerasan memiliki format yang lebih kompleks yakni tidak hanya satu arah namun dua arah secara sepinal.

Kelima, dan yang paling penting yaitu akses ekonomi India dan Cina akan mematikan atau setidaknya melumpuhkan gerakan demokrasi dan HAM di Myanmar yang artinya upaya panjang dengan korban yang tak terhitung dalam memperoleh kebebasan politik menjadi kehilangan makna ketika India dan Cina justru mendekatkan diri kepada Myanmar.

Serangkaian implikasi tersebut sejatinya tidak perlu terjadi bila kedua negara yang sedang naik daun dalam pergulatan ekonomi global tersebut menjunjung tinggi etika pembangunan dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Sudah selayaknya prestasi penghormatan HAM suatu negara menjadi basis penghormatan negara-negara lain terhadap negara tersebut. Kendati pendapat ini nampak terlampau utopis namun, hemat penulis, langkah tersebut menjadi langkah konkrit yang paling mungkin dilakukan dalam konteks hubungan internasional.

C. PENUTUP

Hubungan internasional selama ini dikonstruksi di atas basis gagasan realisme politik. Sulit dipungkiri realisme dalam perjalannya tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis untuk memahami realitas

hubungan internasional, bahkan dalam tingkat tertentu justru mempegaruhi perilaku aktor-aktor dalam bertingkah laku. Cerita anarkisme hubungan internasional sejatinya tidak akan pernah terjadi andai saja konstruksi gagasan yang dikembangkan tidak berbasis realisme. Etika dan norma yang berpihak kepada penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia sepertinya akan menjadi basis yang tepat untuk membangun ide dunia damai. Hubungan India Cina Myanmar menjadi contoh apik betapa nilai HAM tidak menjadi acuan perilaku ketika realisme sudah mengakar sangat kuat dalam sanubari para perilaku politik internasional. HAM justru dianggap sebagai omong kosong dan tidak sebanding manfaatnya dengan pembangunan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Jemadu, A. (2008). *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mohan, C. Raja. (2010). "Embrancing Myanmar: India's Foreign Policy Realism", dalam *RSIS COMMENTARIES*.
- Renaud, Egreteaud. (2003). "India and Burma/ Myanmar Relations From Idealism to Realism". (paper draft). Conference on *India and Burma/ Myanmar Relations: From Idealism to Realism*. Thursday 11th September 2003, Conference Room I, India International Center, New Delhi, India.
- Silaen, Victor. (2009). "Pasang Surut Hubungan dan Kerja Sama Militer AS-RI" *Verity Jurnal*

Hubungan Internasional, Tahun 1, Nomor 2, Juli-Desember .
Tangerang: Jurusan Hubungan Internasional. UPH.

- Srikandi, AG. (2010) *Humanitarian Action and Responbility to Protect in Myanmar: The Political Willingness of the Myanmar Government after Cycelone Nargis*. (makalah dalam seminar IIS-FISIPOL-UGM, Mei 2011).
- "Oil and Gas in Myanmar" diakses dari http://birmanie.total.com/en/contexte/p_1_2.htm, Kamis 23 Des 2010: 11:43 WIB.
- "Indonesia Diminta Tolak Hasil Pemilu Myanmar" *Tempo Interaktif*, Senin 15 November 2010-14:41 wib., diakses dari: <http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2010/11/15/brk,20101115-291979,id.html>, Selasa 21 des 2010, pukul 10:30 WIB.
- "PBB Kutuk Hasil Pemilu Myanmar" Jum'at, 19 November 2010 - 11:08 wib diakses dari: <http://international.okezone.com/read/2010/11/19/18/394786/pbb-kutuk-hasil-pemilu-myanmar>, Selasa 21 Des 2010, pukul 10:30 WIB.
- "RI berpeluang masuk kelompok raksasa baru" harian *Media Indonesia*. Rabu, 3 November 2010.

